



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAISAL
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
3. NHK : 850969

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.132.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 441.000.000
2. Tanah Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
3. Tanah Seluas 1.289 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **331.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI AV1414F SDX/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BFI1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, VESPA PX 150 E Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **282.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	861.088.643
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.606.088.643
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.606.088.643

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.